



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN ARUT SELATAN



KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jalan Iskandar No. 89 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Telp : (0532) 212778 E-mail : arut_selatan17@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2022 dan merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pemerintahan umum di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 22 Februari 2022

CAMAT ARUT SELATAN



MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos

NIP. 19650813 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	99	84	84%	Sangat Tinggi
		Indek Pembangunan Desa/Kelurahan	7	7	100%	
Capaian sasaran strategis 1					92%	
2.	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90%	95,60%	95,60%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					95,60%	
3.	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	93,10%	93,10%	
Capaian sasaran strategis 3					93,10%	

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
4.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	CC	CC	
Capaian sasaran strategis 4					CC	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 93% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kelurahan maupun Desa;
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelayanan;
- c. Memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada Aparatur Kelurahan dan Desa;
- d. Meningkatkan kemampuan SDM ditingkat Kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan;
- e. Perlunya peningkatan pendanaan atau anggaran bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum	2
1.3 Aspek Strategis	6
1.4 Permasalahan Utama	8
1.5 Landasan Hukum	9
1.6 Sistematika Penyajian	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Arut Selatan	11
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	15
2.4 Perjanjian Kinerja	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Arut Selatan	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	30
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3.5 Realisasi Keuangan	32
BAB IV Penutup	36
Lampiran-Lampiran	38

DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Kecamatan Arut Selatan	2
Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022	4
Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022	4
Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022.....	5
Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arut Selatan	12
Tabel: 2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arut Selatan	13
Tabel: 2.3 Indikator Kinerja Utama	15
Tabel: 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	16
Tabel: 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	17
Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah	24
Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	25
Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022	26
Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	26
Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	27
Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022.....	30
Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral	31
Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022	32
Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 2.1 Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	23
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis ditingkat Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Kecamatan Arut Selatan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Camat	1. Dibawah Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
2. Sekretaris Camat	1) Pengelola Kepegawaian	
1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	2) Pengadministrasi Umum	
2) Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	2. Dibawah Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	
3. Kepala Seksi Pelayanan Umum	1) Bendaharan	
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2) Verifikator Keuangan	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	3) Pengolah Data Perencanaan	
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3. Dibawah Kepala Seksi Pelayanan Umum	
7. Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1) Pengadministrasi Umum	
	4. Dibawah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	1. Pengelola Keamanan	
	5. Dibawah Kepala Seksi tata Pemerintahan	
	1) Pengadministrasi Pemerintahan	
	6. Dibawah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	
	7. Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengadministrasi Umum	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Kecamatan Arut Selatan mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan

Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat .

Sampai dengan 31 Desember 2022, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 75 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Administrator	2	2			2				2	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator										
	2. Pengawas	39	23	16	3	23	10	3		39	
	3. Pelaksana	34	12	22		3	7	24		34	23
C	Jabatan Fungsional										
	Jumlah	75	37	38	3	28	17	27		75	23

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Arut Selatan Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Pengadministrasi Persuratan	1	0	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
Kepala Seksi	Pengadministrasi Perizinan	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Pelayanan Umum				
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	0	1
TOTAL		11	0	11

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	27	13.403.043.520,00
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	3	57.500.000
		Alat-alat Angkut	130	2.693.381.400
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	28	48.360.000
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	1375	3.490.825.730
		Alat Studio Komunikasi	52	141.985.000
		Alat Laboratorium	28	17.600.000
		Alat Persenjaan	2	157.972.000

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
		Alat Komputer	139	928.540.165
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	25	9.573.051.943
		Gedung Rumah Dinas	1	103.800.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	5	423.449.000
		Jembatan	5	160.589.700
		Instalasi Listrik dan Telp	10	186.812.000
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan		
		Barang Bercorak Kesenian	17	66.245.000
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	2	63.725.200
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		3	885.325.500

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Pemahaman terhadap TUPOKSI;
2. Pemahaman terhadap peraturan Daerah;
3. Penguasaan Teknologi Informasi;
4. Ketersediaan Sarana Prasarana;
5. Ketersediaan SOP;
6. Tersediannya payung hukum penunjang pelayanan;
7. Dukungan Instansi terkait;

Faktor Internal	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Pemahaman terhadap TUPOKSI	Penguasaan Teknologi Informasi

Faktor Eksternal		Pemahaman terhadap Peraturan Daerah	Ketersediaan Sarana Prasarana
			Ketersediaan SOP
PELUANG	Tersedia nya payung hukum penunjang pelayanan	Alternatif Strategi: meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan penguasaan teknoogi informasi aparatur melalui adanyadukun gan instansi terkait
	Dukunga n instansi terkait		
ANCAMAN	Keterbat asan Anggaran	Alternatif Strategi: Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP
	Letak Geografi s		
	Kejelasa n Prosedur		
	Koordina si Lintas Sektor		

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor

2. Strategi ST
Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sector

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait.

4. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait.

1.4 Permasalahan Utama

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Arut Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Keterbatasan wewenang Camat dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat
4. Realisasi pendapatan IMB tidak mencapai 100%. 5 Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi yang diperlukan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI TAHUN 2022

“Kurangnya dukungan Anggaran/Pendanaan dari Kabupaten untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.”

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Arut Selatan

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K = KETAKWAAN,
H = HARMONIS,
L = LANGGENG,
A = AMAN,
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,
U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **pertama** yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan”**

Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022, Tabel terlampir.

Namun berdasarkan hasil evaluasi sapik oleh kemenpan RB tanggal 13 agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Kecamatan Arut Selatan

Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagai mana tabel terlampir

Tujuan dan Sasaran

Seusai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,	Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum,		80	85	85	90	99	99

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra	
				2017	2018	2019	2020		2021
	elayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban umum	elayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban umum	pemberdayaan asyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum						

Sumber: Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2017 2022

Tabel: 2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
	Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	90	99	99
		Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pemberdayaan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90	94	90	90	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
		masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban umum di desa dan kelurahan						
		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90	90	100	100	100
		Menyediakan dukungan bagi pencapaian Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	B

Sumber: Perubahan Renstra Kecamatan Arut Selatan Tahun 2019-2022

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan

organisasi. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah SKM Semester 1 di Tambah SKM Semester 2 di bagi 2	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen SKM yang masuk
Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah desa yang dibina/jumlah total desa X 100%	Seksi-Seksi	Laporan
Menyediakan kebutuhan penunjang daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rata-rata Capaian /Realisasi Kegiatan	Sekretaris	Laporan SPJ
Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil Evaluasi	Camat	Laporan hasil Evaluasi

Sumber: SK Nomor 060/051/2019

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Arut Selatan Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	99
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan bidang pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90%
3.	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90
4.	Penyediaan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99
2	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90 %
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	melaksanakan tugas dan fungsi		
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	B

PROGRAM**ANGGARAN**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 11.803.577.645 |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90.237.950 |
| 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Aparatur | 137.878.600 |
| 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 3.052.798.805 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.625.778.457	11.803.577.645	177.799.188
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.360.348.352	9.169.838.611	(190.509741)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.314.098.352	9.138.936.211	(175.162.141)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.250.000	30.902.400	(15.347.600)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.880.000	130.442.300	25.562.300

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.760.000	52.614.000	(4.146.000)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.120.000	77.828.300	29.708.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.886.859	518.604.750	129.717.891
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.995.593	40.409.807	414.214
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.538.377	189.600.367	7.061.990
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.816.680	32.816.680	0
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	51.590.209	51.704.236	114.027
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	81.946.000	204.073.660	122.127.660
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.464.994	138.397.693	40.932.699
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.464.994	138.397.693	40.932.699
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.413.200	915.417.430	54.004.230
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	175.763.320	1.236.770
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.413.200	739.654.200	55.241.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	812.785.052	768.751.036	118.091.809
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.967.310	47.496.325	5.470.985
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.175.000	13.175.000	0
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	146.804.050	101.454.500	45.349.550
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.838.692	768.751.036	168.912.344
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		107.282.950	90.237.950	17.045.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	65.610.000	51.250.000	14.360.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	65.610.000	51.250.000	14.360.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	41.672.950	38.987.950	2.685.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	36.898.200	34.213.200	2.685.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	4.774.750	4.774.750	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		142.340.100	137.878.600	4.461.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.340.100	137.878.600	4.461.500
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.556.500	39.197.500	2.641.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51.052.500	51.000.000	52.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	6.300.000	6.300.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.745.000	5.745.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.150.000	6.750.000	5.400.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30.535.300	28.885.300	1.650.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MENDAWAI SEBERANG)		393.999.691	433.862.200	43.500.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393.999.300	433.862.200	43.500.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	282.782.421	320.282.421	37.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111.217.270	117.217.270	6.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MENDAWAI)		393.999.960	437.115.295	43.115.335
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393.999.960	437.115.295	43.115.335
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.113.790	174.229.125	43.115.335
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	262.886.170	262.886.170	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MADUREJO)		397.978.433	436.407.455	38.429.022
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	397.978.433	436.407.455	38.429.022
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	173.178.483	211.627955	38.449.472
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224.799.950	224.779.500	(20.450)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (SIDOREJO)		398.997.739	437.497.739	38.500.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	398.997.739	437.497.739	38.500.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	185.776.739	221.806.739	36.030.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	213.221.000	215.691.000	2.470.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (RAJA)		395.999.770	437.490.365	41.490.595
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	395.999.770	437.490.365	41.490.595
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.432.420	238.881.365	58.448.945
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215.567.350	198.609.000	(16.958.350)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (RAJA SEBERANG)		391.829.900	429.315.260	37.485.360
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391.829.900	429.315.260	37.485.360
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	263.629.900	281.115.260	17.485.360
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	128.200.000	148.200.000	20.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (BARU)		399.000.000	437.473.000	38.473.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	399.000.000	437.473.000	38.473.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.500.000	135.265.000	47.765.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	311.500.000	302.208.000	(9.292.000)

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.625.778.457	11.803.577.645	177.799.188
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.360.348.352	9.169.838.611	(190.509741)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.314.098.352	9.138.936.211	(175.162.141)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.250.000	30.902.400	(15.347.600)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.880.000	130.442.300	25.562.300
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.760.000	52.614.000	(4.146.000)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.120.000	77.828.300	29.708.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.886.859	518.604.750	129.717.891

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.995.593	40.409.807	414.214
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.538.377	189.600.367	7.061.990
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.816.680	32.816.680	0
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	51.590.209	51.704.236	114.027
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	81.946.000	204.073.660	122.127.660
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.464.994	138.397.693	40.932.699
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.464.994	138.397.693	40.932.699
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.413.200	915.417.430	54.004.230
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	175.763.320	1.236.770
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.413.200	739.654.200	55.241.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	812.785.052	768.751.036	118.091.809
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.967.310	47.496.325	5.470.985
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.175.000	13.175.000	0
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	146.804.050	101.454.500	45.349.550
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.838.692	768.751.036	168.912.344

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-Sakip

Aplikasi yang mengintegrasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja

dan evaluasi kinerja secara periodik yakni triwulan sampai tahunan. Aplikasi ini memantau kinerja individu sampai capaian Perangkat Daerah.

Gambar 2.1

Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

No	Aksi	Indikator	Capaian	Evaluasi	Hambatan	Strategi	Tgl	Status	Tanggapan
#0	Meningkatnya rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	0		Untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan monitoring dan evaluasi insial lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan sub kegiatan perumusan kebijakan	Tidak Ada	Meningkatkan sinergitas tim di sekretariat	08/08/2022	🟢 Tanggapan
2	DRS EKA TAURUS SUSANTO	#1 Reviu DAK Fisik Reguler	Terlaksananya kegiatan reviu DAK Fisik Reguler Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	19			15/08/2022	🟢 Tanggapan	
3	DRS HANUUNG	#1 melaksanakan reviu KPDP	Jumlah kegiatan 1 terlaksanaan	terlambatnya penyampaian dokumen laporan oleh sebagian SOPD tertentu	melakukan koordinasi pendampingan SOPD terkait dan konsinyering bersama di luar daerah		14/08/2022	🟢 Tanggapan	
4	MUHAMMAD RUSMABARDI, SH., MH	#1 Melaksanakan Reviu LPDP/CAAP dan TL atas hasil temuan tida pada Desa Tekluk Bogam, Desa Sulung dan Desa Runtu	Jumlah laporan 2	Tertaksana sesuai jadwal	Tidak ada	Memaksimalkan tim Evaluasi	08/08/2022	🟢 Tanggapan	
5	SAMRUDIN, SE	#1 Monitoring dan evaluasi penyampaian anggaran dan PBI #2 Melaksanakan reviu DAK	Laporan 100 % Laporan 200 %				08/08/2022 08/08/2022	🟢 ajuan 🟢 Tanggapan	🟡 Berkas
6	ANDI HERU WINDO, ST., MT	#1 Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi #2 verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah laporan hasil pengawakan 27 laporan 24% Jumlah laporan hasil kegiatan 13 laporan 10%	24% 0%	- masih dalam proses penyusunan laporan	- Percepatan penyusunan laporan	25/07/2022 08/08/2022	🟢 ajuan 🟢 Tanggapan	🟡 Berkas

Sumber: <http://esakip.kotawaringinbaratkab.go.id:8014/>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Arut Selatan

Pada tahun 2022, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 4 (empat) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	99	84	84%	Sangat Tinggi
		Indek Pembangunan Desa/Kelurahan	7	5	98%	
Capaian sasaran strategis 1					92%	
2.	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90%	95,60%	95,60%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					95,60%	
3.	Menyediakan Kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	93,10%	93,10%	
Capaian sasaran strategis 3					93,10%	
4.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	CC	CC	
Capaian sasaran strategis 4					CC	

Sumber: Data diolah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1

Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik

Ketidak berhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 2 (dua) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indikator Kinerja 2: Indeks Pembangunan Kelurahan/Desa

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	99	84	84%
Indek Pembangunan Desa/Kelurahan	Nilai	7	7	100%
Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Persen	90%	95,60%	95,60%
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persen	100%	93,10%	93,10%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	CC	CC

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	86	86	90	99	100%	100%	96%	96%	88%	84%
Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	84	86	90	90	90	90	99%	101%	100%	100%	104%	95%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan	85	87	90	90	100	100	100%	102%	100%	100%	109%	93

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
Penunjang Perangkat Daerah												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	D	D	D	D	C	CC	63%	63%	63%	63%	75%	85%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Arut Selatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	86	86	90	99	100%	100%	96%	96%	88%	84%
Pesentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administarsi	84	86	90	90	94	90	99%	101%	100%	100%	104%	95%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	85	87	90	90	100	100	100%	102%	100%	100%	109%	93
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	D	D	B	B	B	B	63%	63%	63%	63%	75%	85%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tidak tercapainya kinerja/kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik dan mempermudah dalam pengurusan dokumen secara offline dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pesentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administarsi
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini terdapat 2 indikator yang tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

“Peningkatan SDM”

2 Sasaran: Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator 1 :Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 2 ini tercapai kinerjanya dikarenakan terpenuhinya pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan.

3

Sasaran: Menyediakan Kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Ketidak berhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator 1 : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 3 ini tidak tercapai kinerjanya dikarenakan salah satu sub kegiatan yang tidak bisa direalisasikan di karenakan gagal tender..

4

Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

Ketidak berhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 4 ini tidak tercapai kinerjanya dikarenakan kurangnya dokumen pendukung.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan dengan target/standar nasional adalah:

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran I

CATATAN: EFISIENSI BISA DI DAPAT JIKA CAPAIAN KINERJA MINIMAL 100 %

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90%	95,60%	95,60%	90.237.950	85.176.900	94,39%	106%
Total efisiensi anggaran							94,39%	

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Terpenuhinya pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Selain dari sisi anggaran, Kecamatan Arut Selatan juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lian		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Musrenbangcam	Kelurahan, Desa, Organisasi	Menghasilkan program/kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahan/Desa	Hasil Program/Kegiatan Kelurahan/Desa	Untuk masyarakat
2	Stunting	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Laporan proker untuk puskesmas atau lintas sektor terkait	Rencana kerja triwulan	Dapat mengontrol resiko stunting

Sumber: Data diolah

3.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 14.647.207.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 15.084.493.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 14.152.621.472 atau sebesar 93,82%. Data anggaran dan realisasi DPPA Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional	13.769.344.025	13.325.577.373	96,78%
	- Belanja Pegawai	9.138.936.211	8.908.885.817	97,48%
	- Belanja Barang/Jasa	4.630.407.814	4.416.691.556	95,38%
2	Belanja Modal	1.315.148.975	754.324.599	57,36%
	- Belanja Peralatan & Mesin	226.274.248	225.301.831	99,57%
	- Belanja Gedung & Bangunan	915.088.449	413.632.368	45,20%
	- Belanja Jalan dan Irigasi	173.786.278	115.390.400	66,40%
	TOTAL	15.084.493.000	14.079.901.972	93,34%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Arut Selatan 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.803.577.645	10.990.065.203	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.169.838.611	8.986.424.767	98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.138.936.211	8.956.424.767	98,01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.902.400	29.601.850	95,79%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.442.300	119.275.015	91,44%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.614.000	52.140.000	99,10%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.828.300	67.135.015	86,26%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.604.750	479.867.033	92,53%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.409.807	40.135.333	99,31%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.600.367	187.456.333	98,87
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.816.680	32.816.680	100%
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	51.704.236	51.590.109	99,78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	204.073.660	167.868.578	82,26%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.397.693	138.046.056	99,75%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.397.693	138.046.056	99,75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	915.417.430	878.741.264	95,99%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.763.320	150.689.486	85,73%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.654.200	728.051.778	98,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	930.876.861	387.711.068	41,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	47.496.325	42.575.000	89,64%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.175.000	13.175.000	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	101.454.500	63.380.000	62,47%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768.751.036	267.262.868	34,77%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		90.237.950	85.176.900	94,39%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja pemangkat daerah yang ada dikecamatan	51.250.000	46.650.000	91,02%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	51.250.000	46.650.000	91,02%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	38.987.950	38.526.900	98,82%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	34.213.200	33.752.150	98,65%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	4.774.750	4.774.750	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		137.878.600	134.459.948	97,52%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	137.878.600	134.459.948	97,52%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	39.197.500	37.413.848	95,45%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51.000.000	50.975.000	99,95%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	6.300.000	6.185.000	98,17%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.745.000	5.490.800	95,56%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.750.000	5.535.000	82,00%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	28.885.300	28.860.300	99,91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MENDAWAI SEBERANG)		437.499.691	436.133.250	99,69%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	433.862.200	436.133.250	99,69%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	320.282.421	319.630.000	99,83%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.217.270	113.473.250	96,81%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MENDAWAI)		437.115.295	421.143.030	96,35%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	437.115.295	421.143.030	96,35
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	174.229.125	161.385.480	92,63%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	262.886.170	259.757.550	98,81%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MADUREJO)		436.407.455	398.934.250	91,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	436.407.455	398.934.250	91,41%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	211.627.955	194.064.900	92%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224.779.500	204.869.350	91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (SIDOREJO)		437.497.739	427.153.092	97,64%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	437.497.739	427.153.092	97,64%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	221.806.739	211.562.092	95,38%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215.691.000	215.591.000	99,95%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (RAJA)		437.490.365	437.105.535	99,91%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	437.490.365	437.105.535	99,91%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	238.881.365	238.881.365	99,87%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.609.000	198.546.000	99,97%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (RAJA SEBERANG)		429.315.260	414.765.264	96,61%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	429.315.260	414.765.264	96,61%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	281.115.260	266.565.264	94,82%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	148.200.000	148.200.000	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (BARU)		437.473.000	407.685.000	93,19%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	437.473.000	407.685.000	93,19%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.265.000	105.625.000	78,09%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	302.208.000	302.060.000	99,95%
TOTAL		15.084.493.000	14.079.901.972	93,34%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Arut Selatan 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 93,34 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”. (ISI DAN SESUAIKAN, jika Sedang maka perlu penjelasan dan analisa)

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 93,34 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 93,34 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.079.901.972 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pelayanan di Kecamatan;
2. Meningkatnya jumlah desa yang bermasalah dalam penggunaan dana desa
3. Dua kelurahan yaitu Raja Seberang dan Mendawai Seberang belum optimal dalam pemenuhan infrastruktur dasarh

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Kecamatan Arut Selatan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Merencanakan dengan lebih matang pada proses perencanaan dan memaksimalkan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan terutama untuk Dana Kelurahan.
2. Perlunya revisi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mengurus IMB atas bangunan yang didirikan.
4. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2023
CAMAT ARUT SELATAN,

MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos
NIP. 19650813 200212 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN